

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019



BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kementerian Pertanian

Daftar Isi

- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Diumumkan secara Serta Merta
- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Tersedia Setiap Saat

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)						
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Online	
1	Sejarah Badan Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
2	Profil Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
3	Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
4	Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
5	Fungsi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Umum		v	Hingga Periode Berganti
7	Agenda Kegiatan	Jakarta	Bagian Umum		v	3 bulan
8	Profil Singkat Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
9	Informasi Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
10	Informasi Hak Memperoleh Informasi Publik	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
11	Tata Cara Pengaduan Masyarakat	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
12	IKM Semester I Tahun 2015	Jakarta, Juli 2015	Bagian Umum	v	v	6 bulan
13	IKM Semester II Tahun 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Umum	v	v	6 bulan
14	IKM Semester I Tahun 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Umum		v	6 bulan

15	IKM Semester II Tahun 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Umum		v	6 bulan
16	IKM Semester I Tahun 2017	Jakarta, Juli 2017	Bagian Umum		v	6 bulan
17	IKM Semester II Tahun 2017	Jakarta, Januari 2018	Bagian Umum		v	6 bulan
18	IKM Semester I Tahun 2018	Jakarta, Juli 2017	Bagian Umum		v	6 bulan
19	IKM Semester II Tahun 2018	Jakarta, Januari 2018	Bagian Umum		v	6 bulan
20	Informasi Layanan Publik	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
21	Program/Kegiatan	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	Hingga Periode Berganti
22	Informasi Pengumuman Barang dan Jasa	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantinaan		v	Hingga Periode Berganti
23	Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2016	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
24	RKT 2012	Jakarta, Agustus 2011	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
25	RKT 2013	Jakarta, Mei 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
26	RKT 2014	Jakarta, Agustus 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
27	RKT 2015	Jakarta, Agustus 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
28	RKT 2016	Jakarta, November 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
29	RKT 2017	Jakarta	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
30	RKT 2018	Jakarta, Juli 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
31	RKT 2019	Jakarta, Mei 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
32	RKA-KL 2017	Jakarta, Agustus 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
33	RKA-KL 2018	Jakarta, Desember 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun

34	RKA-KL 2019	Jakarta, Desember 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
35	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
36	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
37	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
38	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
39	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
40	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2017	Jakarta, Januari 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
41	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2018	Jakarta, Januari 2019	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
42	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
43	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
44	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
45	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
46	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
47	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2017	Jakarta, Januari 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
48	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2018	Jakarta, Januari 2019	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
49	Indikator Kinerja Semester I TA 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Perencanaan		v	6 bulan
50	DIPA INDUK 2014	Jakarta, 5 Desember 2013	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
51	DIPA INDUK 2015	Jakarta, 14 November 2014	Bagian Perencanaan		v	1 tahun

52	DIPA INDUK 2016	Jakarta, 7 Desember 2015	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
53	DIPA INDUK 2017	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
54	DIPA INDUK 2018	Jakarta, 5 Desember 2017	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
55	DIPA INDUK 2019	Jakarta, 5 Desember 2018	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
56	Rencana Anggaran 2015	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
57	Rencana Anggaran 2016	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
58	Rencana Anggaran 2017	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
59	Rencana Anggaran 2018	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
60	Laporan Realisasi Anggaran 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
61	Laporan Realisasi Anggaran 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
62	Laporan Realisasi Anggaran 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
63	Laporan Realisasi Anggaran 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
64	Laporan Realisasi Anggaran 2016	Jakarta, 13 Juni 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
65	Laporan Realisasi Anggaran 2017	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
66	Laporan Realisasi Anggaran 2018	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
67	Laporan Neraca Keuangan TA 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun

68	Laporan Neraca Keuangan TA 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
69	Laporan Neraca Keuangan TA 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
70	Laporan Neraca Keuangan TA 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
71	Laporan Neraca Keuangan TA 2016	Jakarta, 13 Juni 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
72	Laporan Neraca Keuangan TA 2017	Jakarta, 31 Desember 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
73	Laporan Neraca Keuangan TA 2018	Jakarta, 31 Desember 2018	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
74	Laporan Arus Kas 2015	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
75	Laporan Arus Kas 2016	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
76	Laporan Arus Kas 2017	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
77	Laporan Arus Kas 2018	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
78	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2015	Jakarta, 1 Januari 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
79	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2016	Jakarta, 1 Januari 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
80	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2017	Jakarta, 1 Januari 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
81	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2018	Jakarta, 1 Januari 2018	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
82	Daftar Aset 2012	Jakarta, 31 Desember 2012	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun

83	Daftar Aset 2013	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
84	Daftar Aset 2014	Jakarta, 31 Desember 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
85	Daftar Aset 2015	Jakarta, 31 Desember 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
86	Daftar Aset 2016	Jakarta, 31 Desember 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
87	Daftar Aset 2017	Jakarta, 31 Desember 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
88	Laporan PPID Tahunan 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
89	Laporan PPID Tahunan 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
90	Laporan PPID Tahunan 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
91	Laporan PPID Tahunan 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
92	Laporan PPID Tahunan 2017	Jakarta, Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)						
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Online	
1	Alur Pemeriksaan Produk Hewan (Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi)	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
2	Alur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Bahan Biologik dari Luar Negeri	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
3	Alur Lalulintas Antar Area bahan Patogen dan/atau Bahan Biologik	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
4	Prosedur Karantina Hewan Ekspor	Jakarta	Bidang Karantina Hewan Hidup		v	Berlaku Selamanya
5	Alur Penetapan Dan Pemberian No Registrasi Rumah Walet	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
6	Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) 500 media pembawa benih	Jakarta, 13 Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Berlaku Selamanya
7	Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) 50 media pembawa non benih	Jakarta, Juli 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
8	Prosedur Karantina untuk Pemasukan Tumbuhan dan Produk Tumbuhan ke Wilayah RI	Jakarta	Bidang Karantina Tumbuhan Benih dan Non Benih		v	Berlaku Selamanya

9	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	Jakarta, Mei 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
10	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Jakarta, 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Berlaku Selamanya
11	Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar	Jakarta, 13 Juni 2012	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
12	Pemasukan Sayuran Umbi Lapis	Jakarta, 13 Juni 2012	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
13	Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar berupa Bawang Putih	Jakarta, 6 Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
14	Pemasukan Produk Kayu Berupa Furniture yang Telah Diproses Sempurna (Fully Processed)	Jakarta, 6 Juni 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Berlaku Selamanya
15	Pemasukan media pembawa dari negara endemis penyakit South Asia Leaf Blight (SALB) yang disebabkan oleh <i>Microcyclus ulei</i>	Jakarta, 19 Desember 1989	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
16	Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jakarta, November 2016	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
17	Pemasukan Agens Hayati	Jakarta, 1 Juni 1995	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Berlaku Selamanya
18	Persyaratan Karantina Tumbuhan untuk Pengeluaran Tumbuhan dan Produk Tumbuhan dari Dalam Negeri	Jakarta	Bidang Karantina Tumbuhan Benih dan Non Benih		v	Berlaku Selamanya

19	Daftar Hama Penyakit Hewan	Jakarta, 9 Desember 2009	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
20	Daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	Jakarta, September 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
21	Daftar Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Sebagai Pihak Ketiga Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu	Jakarta	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
22	Daftar Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)	Jakarta, Januari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
23	Daftar Fasilitas Ekspor Palm Kernel Expeller (PKE) Tujuan New Zealand	Jakarta, Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
24	Daftar Perusahaan Fumigasi dengan Metil Bromida, Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 7 Februari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
25	Daftar Perusahaan Kemasan Kayu, Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juni 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
26	Daftar Perusahaan Fumigasi dengan Fosfin (PH3), Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 23 Januari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
27	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Antar Area 2016	Jakarta, Oktober 2017	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
28	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Ekspor 2016	Jakarta, November 2016	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya

29	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Impor 2016	Jakarta, Desember 2016	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
30	Daftar Pengakuan Area Bebas OPTK Tertentu (Pest Free Area, PFA) oleh Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 2016	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
31	Instruksi Pelarangan Unggas	Jakarta, Januari 2017	Bidang Karantina Hewan Hidup		v	Hingga Masa Berlakunya
32	Rekapitulasi Negara yang Mendapatkan Pengakuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Mendapat Registrasi Laboratorium Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 5 Mei 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
33	Prosedur Pengajuan Aplikasi Instalasi Karantina Hewan (IKH)	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
34	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Virus	Jakarta, 2009	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
35	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Bakteri	Jakarta, 2008	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
36	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Cendawan	Jakarta, 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
37	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Nematoda	Jakarta, November 2010	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
38	Diagnosis Protokol OPTK Kelompok Serangga Kayu	Jakarta, Agustus 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
39	Pedoman Teknis Perlakuan Karantina Tumbuhan dengan Iradiasi Sinar Gamma	Jakarta, Desember 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

40	Standar Teknis Perlakuan Fosfin Cair (Liquid Fosfin)	Jakarta, April 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
41	Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Ethyl Formate	Jakarta, April 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
42	Manual Fumigasi Metil Bromida	Jakarta, November 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
43	Manual Fumigasi Fosfin	Jakarta, Mei 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
44	Tata Cara Fumigasi dengan Fosfin	Jakarta, Juli 2011	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
45	Prosedur Perlakuan Kontrol Udara ECO2	Jakarta, Oktober 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
46	Standar Fumigasi Metil Bromida dan Fosfin pada Palka Kapal	Jakarta, Maret 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
47	Standar Perlakuan Fumigasi Sulfuryl Fluoride	Jakarta, September 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
48	Standar Teknis Perlakuan dengan Ethylene Oxyde	Jakarta, Mei 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
49	Standar Teknis Perlakuan Air Panas (Hot Water Treatment)	Jakarta, November 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
50	Pedoman Perlakuan Alfa Sipermetrin	Jakarta, Juni 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
51	Pedoman Teknik Pengambilan Sampel Biji-Bijian Untuk Benih	Jakarta, September 2007	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Hingga Masa Berlakunya

52	Pedoman Pengambilan Contoh Produk Tumbuhan Untuk Pemeriksaan Kesehatan MP-OPTK/Non Benih	Jakarta, 2011	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
53	Pedoman Pembuatan dan Pengelolaan Koleksi Penyakit Tumbuhan	Jakarta, 2009	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
54	Pedoman Mengoleksi, Preservasi serta Kurasi Serangga dan Artrophoda lainnya	Jakarta, 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
55	Pedoman Surveilensi Organisme Pengganggu Tumbuhan/Karantina (OPT/K)	Jakarta, November 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
56	Pedoman Sertifikasi Buah Salak Indonesia ke China	Jakarta, September 2014	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
57	Pedoman Sertifikasi Duku	Jakarta, Desember 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
58	Pedoman Sertifikasi Manggis Tujuan Australia	Jakarta, September 2014	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
59	Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Alpukat	Jakarta, Oktober 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
60	Pedoman Sertifikasi PKE Tujuan New Zealand	Jakarta, September 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
61	Pedoman Sertifikasi Barecore	Jakarta, April 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
62	Pedoman registrasi perusahaan fumigasi fosfin	Jakarta, Januari 2011	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

63	Pedoman Penetapan Pest Free Production Site	Jakarta, 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
64	Pedoman tindakan KT terhadap pemasukan Jagung kedelai dari negara endemis SALB	Jakarta, 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
65	Pedoman Identifikasi Bawang Merah dan bawang Bombay	Jakarta, 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
66	Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
67	Deskripsi dan Visualisasi Jenis Asing Invasif (JAI)/Invasive Alien Species (IAS) Kelompok Tumbuhan dan Organisme Yang Berasosiasi Dengan Tumbuhan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
68	Data Operasional Tahunan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
69	Data Operasional Bulanan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
70	Pengakuan (Rekognisi) Area Bebas OPT Tertentu	Jakarta	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
71	Pengakuan (Rekognisi) Negara Rekognisi dan Negara Registrasi Lab	Jakarta	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)							
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
				Cetak	Online		
1	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
2	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
3	Standart Operasional Procedure (SOP) Administrasi	Jakarta, Juni 2014	Bagian Umum	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
4	Renstra 2015 - 2019	Jakarta, Desember 2014	Bagian Perencanaan	v	v	5 tahun	SS
5	Tarif PNB	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
6	Prosedur Rencana Tindakan Darurat Kebakaran di Gedung Pemerintah	Jakarta, Desember 2005	Biro Umum		v	Hingga Periode Berganti	SS
7	Data Operasional Tahunan	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantina		v	1 tahun	SS
8	Data Operasional Bulanan	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantina		v	1 bulan	SS
9	Pedoman SMAP ISO 37001: 2016	Jakarta	Bagian Umum		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
10	DIP Barantan 2016	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
11	DIP Barantan 2017	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
12	DIP Barantan 2018	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
13	Statistik Barantan 2012 - 2016	Jakarta, Juli 2017	Bagian Perencanaan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
14	Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2017	Jakarta, Januari 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun	SS
15	Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2018	Jakarta, Januari 2018	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun	SS
16	Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2019	Jakarta, Januari 2019	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun	SS

17	Pedoman Sekretariat Badan Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Perencanaan, Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
18	Pedoman Karantina Hewan	Jakarta	Bidang KH Hidup, Bidang KH Produk, Bidang Kehani		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
19	Pedoman Karantina Tumbuhan	Jakarta	Bidang KT Benih, Bidang KT Non Benih, Bidang Kehati		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
20	Pedoman Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan	Jakarta	Bidang Kepatuhan, Bidang Kerjasama, Bidang Informasi		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
MOU							
17	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tentang Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina.	Jakarta, 10 Mei 2005	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
18	Peraturan Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Yang Berasal Dari Barang Impor, Ekspor Dan Kiriman Antar Area Yang Dikirim Melalui Pos Dan/Atau Jasa Titipan.	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
19	Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan Dan Pengawasan Keamanan Hayati.	Jakarta, 6 Maret 2012	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS

20	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dan Badan Karantina Pertanian tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar	Jakarta, 4 Januari 2013	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
21	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Kerjasama Pengawasan Barang Yang Dilarang Atau Dibatasi (Lartas) Di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pengawasan Barang Beredar Di Pasar	Jakarta, 18 Desember 2013	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
22	Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dengan Universitas Jambi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati	Jakarta, 30 April 2014	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
23	Nota Kesepahaman Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sistem Perkarantina	Jakarta, 22 Juli 2015	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS

24	Nota Kesepahaman Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan	Jakarta, 5 Februari 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
25	Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina Yang Berasal dari Barang Impor, Ekspor Dan Antar Area Yang Dikirim Melalui Pos Dan/Atau Jasa Titipan	Jakarta, 16 Juni 2010	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
26	Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Akses Internet dalam Rangka Mendukung Pelayanan karantina Pertanian	Jakarta, 13 Agustus 2015	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
27	Perpanjangan I Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara	Jakarta, 5 April 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
28	Perjanjian Kerjasama antara Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama Pendidikan Dan Penelitian Bidang Karantina Hewan	Jakarta, 5 Februari 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS

29	Perjanjian Kerja Sama antar Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perairan Republik Indonesia	Jakarta, 20 Mei 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
30	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Deputi Bidang Pengkajian Persandian tentang Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Sistem E-Cert Sanitary and Pythosanitary (SPS)	Jakarta, 4 Mei 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
31	Partnership Arrangement between Indonesia Agriculture Quarantine Agency and Australian Government Department of Agriculture and Water Resource on Implementation of Electronic Certification	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
32	Perundingan SPS dalam Kerangka Putaran ke-10 IE FTA	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
33	Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) Ke-4	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
34	Pertemuan 12 th Indonesia - Singapura Agri-Business Sub Working Group Meeting	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
35	Pertemuan 3 rd <i>Joint Border Committee Indonesia - Papua New Guinea</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
36	the 2 nd Round of Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (2 nd I-EU CEPA)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
37	Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA), Sub Negotiating Group on Sanitary and Phythosanitary (SPS)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
38	Perundingan Working Group on Sanitary and Phythosanitary Measures 12 Round IEFTA-CEPA	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
39	Pertemuan The 4th Indonesia - Malaysia Joint Working Group (JWG) on Agriculture Cooperation	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
40	The 4 th Joint Working Group On Agricultural Indonesia - India	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS

41	Perundingan Putaran Ke-7 Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
42	Pertemuan the Fifth Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary (SC-SPS) AANZFTA parallel dengan the 8 th ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (AANZFTA-JC)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
43	The 8 th SWG-SPS Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
44	Pertemuan RCEP Sub Working Group ke-9	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
45	Pertemuan the 5 th China-Asean Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) dan Penandatanganan Protocol Manggis	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
46	the 10 th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
47	The 11 th Meeting Of The RCEP Sub-Working Group On Sanitary And Phytosanitary Measures	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
48	The 12 th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
49	Pertemuan Committee on Agriculture Special Session (CoA-SS) dan Committee on Agriculture (CoA)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
50	Pedoman Kerja Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara NOMOR 6758/HK.220/L/7/2016 dan NOMOR KERMA/6/VII/2016	Jakarta, 14 Juli 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
51	Surat Keputusan Bersama Kabadan dan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut NOMOR 1049/KPTS/HK.230/K/06/2017 dan NOMOR R/380/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Indonesia	Jakarta, 21 Juni 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
52	Sidang Reguler Komite SPS-WTO	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
	Siaran Pers dan Keterangan Pers						

53	Disiapkan, Lahan Percontohan untuk Kendalikan Ham	Indramayu, 15 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
54	Benih Jagung Berbakteri Dimusnahkan Karantina Sura	Surabaya, 28 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
55	Menko Puan Maharani Beri Penghargaan Atas Inovasi	Solo, 25 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
56	Empat Ekor Cendrawasih Selundupan Berhasil Digaga	Medan, 11 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
57	Tingkatkan Kesiagaan, Karantina Optimalkan Layanan	Jakarta, 8 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
58	Penuhi Target Gabah 1.1 juta ton, UPSUS Jabar Percep	Cirebon, 17 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
59	Karantina Pertanian Musnahkan Komoditas Pertanian	Banten, 1 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
60	Awali Panen dan Tanam, Mentan Tambahkan Target Ta	Bandung, 21 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
61	Waspada Ancaman Bioterrorisme dan Agroterrorisme,	Bekasi, 18 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
62	Karantina Surabaya Musnahkan Paket Pos Benih Ilega	Surabaya, 12 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
63	Flu Burung Merebak di Cina, Ini Antisipasi Karantina P	Jakarta, 4 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
64	Kinerja Operasional meningkat, Karantina Konsisten D	Jakarta, 16 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
65	Implementasi E-Cert, Perkuat Kerjasama Pertanian Ind	Jakarta, 23 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
66	Barantan Dukung Penegakan Hukum Kasus Pungli Di P	Surabaya, 3 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
67	Modus Baru Penyelundupan Satwa dan Benih Melalui	Jakarta, 17 Oktober 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
68	Indonesia Pimpin Kelompok Kerja ISPM No. 31 di Tingk	Bekasi, 22 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
69	Tata Lahan Pegunungan, Tasikmalaya Capai Target Ce	Tasikmalaya, 1 September 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
70	Sewindu, Beras Organik Tasik Tembus Pasar Dunia	Tasikmalaya, 1 September 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
71	APPPC Harmonisasikan Metoda Pengambilan Sampling	Bekasi, 22 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
72	Luas Tambah Tanam Jabar Demi 1,2 Juta Ton GKP	Bandung, 20 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
73	Transaksi Digital Ekspor Impor Produk Pertanian Dimu	Jakarta, 10 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
74	OMBUDSMAN : BARANTAN Contoh Pelayanan Publik Le	Jakarta, 20 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS

75	Produktivitas Jagung Terus Meningkat	Garut, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
76	Giliran Selandia Baru Nikmati Manisnya Buah Salak	Yogyakarta, 12 Oktober 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
77	Jamin Kesehatan Sapi di Kalimantan, IKH Pangkalan Bun Diresmikan	Pangkalan Bun, 3 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
78	Lagi, Karantina Soekarno Hatta Musnahkan Benih Padi Berpenyakit Asal India	Banten, 9 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
79	Berikan Apresiasi Kepada Petani, Kementan dan HKTI Gelar Syukur Panen	Indramayu, 23 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
80	In-Line Inspection Karantina: 1 Ton Baby Buncis Lembang Ekspor Rutin ke Singapura	Jawa Barat, 23 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
81	Ini 5 Langkah Strategis, Panen Berlimpah di Kabupaten Subang	Subang, 20 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
82	2018, Barantan Fokus Garap Paperless Dan Kerjasama TNI-Polri	Jakarta, 17 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
83	Dimusnahkan! Benih Kedelai Bervirus Penyebab Penurunan Produksi	Jakarta, 28 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
84	Akselerasi Ekspor Manggis, Komitmen Kementan Sejahterakan Petani	Tanjung Priok, 5 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
85	Karantina: Daging Wagyu Aman Diekspor Myanmar	Jakarta, 8 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
86	Metode Iradiasi Disetujui, Mangga Bakal Masuk Pasar Australia	Melbourne, 15 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
87	Pj Upsus Jabar Targetkan Ltt Okt-Mar Subang Melebihi Tahun 2017	Subang, 22 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
88	Wakil Bupati Bekasi: Sektor Pertanian Harus Diperjuangkan	Bekasi, 27 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
89	Bailey, Pelacak Mungil Khusus Satwa Hadir Di Indonesia	Jakarta, 28 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
90	Tidak Ada Pungli Dalam Layanan Karantina	Jakarta, 27 Februari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
91	Terus Meningkat, Ini 3 Syarat Utama Ekspor Sarang Walet Ke Tiongkok	Jakarta, 2 Maret 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
92	Rock Melon Australia Berbakteri, Barantan Bergerak Cepat	Jakarta, 3 Maret 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
93	Kementan Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia	Jakarta, 7 Maret 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
94	Usut Tuntas Kasus Bawang Putih Impor Berpenyakit	Jakarta, 12 Maret 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
95	Menyusul Cavendis, Pisang Mas Tanggamus Masuki Pasar Ekspor	Lampung, 24 April 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
96	Hingga Mei, Ekspor Tepung Jagung Indonesia Capai 9 Ribu Ton Lebih	Cilegon, 20 Mei 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
97	Ini Alasan, 5 Nuri Hitam Papua Mati Di Terminal 3	Tangerang, 21 Mei 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS

98	Sikapi Dugaan Bareskrim, Karantina Turunkan Tim Kepatuhan	Jakarta, 26 Juni 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
99	Dorong Ekspor Produk Pertanian, Kementan Luncurkan Program Geber	Jakarta, 7 Juni 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
100	Kawal Pengawasan Produk Pangan Dan Pertanian, Barantan Perkuat Kerjasama Dengan Polri	Bekasi, 9 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
101	Masuki Musim Kemarau, Karawang Pacu Luas Tanam	Karawang, 13 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
102	Karantina Pertanian Terapkan Standar Anti-Suap ISO 37001:2016	Jakarta, 17 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
103	Kementan Kawal Kesehatan Kuda Asian Games 2018	Jakarta, 14 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
104	Daging Celeng Ilegal Berpotensi Ancam Kesehatan Ditahan Karantina Cilegon	Jakarta, 22 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
105	Ancam Kesehatan, Karantina Tindak Tegas Pelaku Penyelundupan Daging Celeng	Cilegon, 23 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
106	Mengandung Lalat Buah 'Ganas', Buah Impor Asal Thailand Ditahan Karantina Soekarno Hatta	Jakarta, 27 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
107	Ditemukan Larva Hidup: 900 Kg Buah Asal Thailand Dimusnahkan Karantina Soetta	Banten, 2 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
108	Karantina Pertanian Pastikan Standar Kesehatan 17 Kuda Asian Games Asal Belgia	Banten, 11 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
109	Hadapi Kekeringan Di Jawa Barat, Kementan Terapkan Teknologi Pat-Bo	Ciamis, 14 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
110	Di Musim Kering, Petani Karawang Berhasil Kendalikan Puso	Karawang, 24 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
111	Sinergi Kementan - BBWS Bekasi Timur Manfaatkan Air Situ Cipalahar Untuk Petani Bekasi Selatan	Bekasi, 21 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
112	Kementan Apresiasi Upaya Gerdal Petani Subang	Subang, 21 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
113	Tren Ekspor Produk Pertanian Meningkat, Karantina Pertanian Dibuka Di Ampana	Ampana, 17 September 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
114	Diperlukan, Aturan Khusus Pengawasan Lalu Lintas Daging Celeng	Cilegon, 21 September 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
115	Terapkan Manajemen Anti Suap, 3 Eksporir Pertanian Dapat Layanan Prioritas Karantina	Sentul, 5 Oktober 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
116	Minati Buah Naga, Karantina Cina Lakukan Ini Di Denpasar	Denpasar, 26 Oktober 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
117	Tren Ekspor Meningkat, Protokol Karantina Indonesia - Iran Disiapkan	Jakarta, 1 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
118	Penguatan Ekonomi Berbasis Pertanian Terus Didorong Untuk Wilayah Perbatasan Entikong	Entikong, 3 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
119	Sabet 3 Penghargaan Di Festival Bunga Dunia 2018, Ini Fasilitas Barantan	Taichung, 6 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS

120	Pasarkan Air Kelapa Ke Selandia Baru, Barantan Tingkatkan Penggunaan Sertifikat Elektronik	Selandia Baru, 6 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
121	Dukungan Karantina Terhadap Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian	Bogor, 19 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
122	Pemerintah Jamin Indonesia Bebas Selada Romaine Tercemar E.Coli	Jakarta, 23 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
123	Lobi Kementan Berhasil Kembali Buka Pasar Kopi Instan Indonesia Senilai 8 Triliun Ke Filipina	Jakarta, 26 Desember 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
124	Jadi Tuan Rumah Wgafcc 2019, Indonesia Ingin Perkuat Akses Pasar Pertanian Ke Australia	Jakarta, 27 Desember 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
125	Kementan Siapkan Instrumen Pengawasan Peredaran Daging Celeng	Jakarta, 4 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
126	Tingkatkan Ekspor Komoditas Pertanian, Kementan Terus Kembangkan Instrumen Dagang SPS	Jakarta, 4 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
127	Kementan Dorong Petani Milenial Masuki Pasar Ekspor	Bogor, 15 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
128	Genjot Ekspor Buah Nusantara, Agro Gemilang Kementan Dimulai	Bekasi, 22 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
129	Awali Tahun 2019, Kementan Amankan Benih Rempah Impor Ilegal	Tangerang, 25 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
130	Kementan Dorong Pke Dan Copex Masuk Pasar Ekspor	Sulawesi Utara, 16 Februari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
131	Kemtan Dan DPR Dorong Ekspor Melati Petani Tegal	Jawa Tengah, 20 Februari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
132	Gubernur Sulsel Lepas Ekspor 11 Produk Pertanian Asal Sulsel Ke Manca Negara	Makassar, 23 Februari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
133	Tembus 1,26 Triliun Rupiah, Ekspor Produk Pertanian Via Karantina Soekarno Hatta	Banten, 26 Februari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
134	Lagi, Kementan Melepas Ekspor 25 Ton Kubis Berastagi Ke Malaysia	Berastagi, 27 Februari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
135	Pertama Kali, Kementan Lepas Vanili Dari Yogya Ke Amerika Serikat	Yogyakarta, 5 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
136	Digenjot, Ekspor Produk Pertanian Asal Kalimantan Timur	Balikpapan, 5 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
137	Kementan Lepas 200 Ton Rumput Laut Asal Pinrang Ke 4 Negara	Kab. Pinrang, 8 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
138	Bintan Ekspor Lempengan Karet Ke Lima Negara	Tanjungpinang, 8 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
139	Perdana, Ekspor Butter Cocoa Asal Kendari Langsung Ke Belanda	Kendari, 11 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
140	Makin Legit, Produk Kelapa Sawit Asal Riau Dilepas Kementan	Pekanbaru, 11 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
141	Rempah Indonesia Timur, Hangatkan Manca Negara	Makassar, 13 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS

142	Dongkrak Ekspor, Mentan Luncurkan Aplikasi Peta Potensi Ekspor Komoditas Pertanian	Makassar, 13 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
143	108 Ton Lidi Nipah Jambi Di Ekspor Hingga India	Jambi, 14 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
144	Menangkap Peluang Ekspor Pertanian Dan Perikanan, 3 Instansi Pemerintah Lakukan Ini	Jakarta, 5 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
145	Dari Batas Negara, Kementan Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Asal NTT	Motaaain, 11 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
146	Kementan Gencarkan Ekspor Komoditas Asal Pertanian Di Perbatasan Skouw	Skouw, 14 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
147	Jadi Pintu Masuk Ekonomi Di Wilayah Pacific, Kementan Genjot Ekspor Papua	Jayapura, 14 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
148	Dipacu Percepatan Luas Tambah Tanam Padi Di Jabar	Indramayu, 21 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
149	Di Tanjung Priok, Kementan Lepas Ekspor Delapan Komoditas Pertanian Sekaligus	Tanjungpriok, 22 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
150	Selain Manggis, Alang-Alang Dan Kepompong Jadi Andalan Ekspor Komoditas Pertanian Asal Bali	Denpasar, 29 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
151	Buah Naga Indonesia Bersiap Masuk Pasar Cina	Beijing, 29 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
152	Tingkatkan Akses Pasar, Indonesia - PNG Gelar Pertemuan TWG	Bali, 29 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
153	Perdana, Dorong Ekspor Pala Organik Kementan Resmikan Tempat Pemeriksaan Lain	Ambon, 30 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
154	Meningkat, Tren Ekspor Olahan Sawit Asal Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Belitung, 2 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
155	Jalin Kerjasama Bilateral, Indonesia Buka Akses Pasar Buah Tropis Eksotik Ke Argentina	Jakarta, 8 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
156	Kementan Ajak Pemprov NTB Pacu Ekspor Produk Pertanian	Mataram, 9 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
157	Kementan Lepas Ekspor Ratusan Ribu Ton Biji Pinang Asal Jambi	Jambi, 11 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
158	Kembali Menguat, Ekspor Olahan Sawit Asal Tanjung Balai Asahan	Tanjungbalai Asahan, 13 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
159	Delapan Kali Lipat, Meningkatkan Ekspor Komoditas Pertanian Dari Entikong	Entikong, 15 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
160	Begini Cara Kementan Tunjukkan Komitmen Dorong Ekspor Di Kalsel	Banjarmasin, 26 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
161	Kementan Pacu Terus Ekspor Komoditas Pertanian Asal Pontianak	Pontianak, 27 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
162	Kementan Musnahkan Benih Hortikultura Asal India Berbahaya	Tangerang, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS

163	Pacu Ekspor Asal Jatim, Kementan Buka Akses Pasar Dan Tumbuhkan Eksportir Baru	Surabaya, 12 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
164	Jadi Siklus Rutin, Ini Antisipasi Tim Upsus Jabar Kabupaten Bekasi Atasi Kekeringan	Bekasi, 16 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
165	Kementan Dorong Tepung Kelapa Asal Wilayah Kepulauan Sultra Ekspor Langsung	Bau-bau, 20 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
166	Gubernur Sultra Gandeng Kementan Pacu Hasil Pertanian	Kendari, 19 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
167	Terobos Hambatan Teknis Ekspor, Kementan Luncurkan 4 Inovasi Tindakan Perlakuan Karantina	Bekasi, 2 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
168	Akselerasi Ekspor, Kementan Ekspor Perdana Edamame Ke Belanda Menggunakan Sertifikat Elektronik	Semarang, 3 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
169	Tidak Hanya Cangkang Sawit Dan Kayu Olahan, Bengkulu Kini Ekspor Sarang Walet	Bengkulu, 27 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya	SS
	Undang - Undang						
170	NOMOR 24 TAHUN 2007 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA	Jakarta, 26 April 2007	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
171	NOMOR 20 Tahun 1997 Tentang PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 23 Mei 1997	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
172	NOMOR 4 Tahun 1984 Tentang WABAH PENYAKIT MENULAR	Jakarta, 22 Juni 1984	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
173	NOMOR 25 TAHUN 2009 Tentang PELAYANAN PUBLIK	Jakarta, 18 Juli 2009	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
174	NOMOR 25 TAHUN 1999 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	Jakarta, 19 Mei 1999	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
175	NOMOR 36 TAHUN 2000 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 21 Desember 2000	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
176	NOMOR 29 TAHUN 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	Jakarta, 21 Desember 2000	Ditjen PVT		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
177	NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Jakarta, 4 Juni 2009	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
178	NOMOR 19 TAHUN 2009 Tentang PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)	Jakarta, 11 Juni 2009	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

179	NOMOR 39 TAHUN 2008 Tentang KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 6 November 2008	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
180	NOMOR 44 TAHUN 2007 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 1 November 2007	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
181	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 Tentang LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025	Jakarta, 5 Februari 2007	BAPPENAS		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
182	NOMOR 17 TAHUN 2007 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025	Jakarta, 5 Februari 2007	BAPPENAS		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
183	NOMOR 4 TAHUN 2006 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)	Jakarta, 20 Maret 2006	Ditjen Tanaman Pangan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
184	NOMOR 16 TAHUN 1992 Tentang KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN	Jakarta, 8 Juni 1996	Badan Karantina Pertanian		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
185	NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 5 April 2003	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
186	NOMOR 15 TAHUN 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 19 Juli 2004	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
187	NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang PORNOGRAFI	Jakarta, 26 November 2008	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
188	NOMOR.5 TAHUN 1990 Tentang KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jakarta, 10 Agustus 1990	Kementerian Kehutanan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
189	NOMOR 41 TAHUN 1999 Tentang KEHUTANAN	Jakarta, 30 September 1990	Kementerian Kehutanan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

190	NOMOR 9 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Jakarta, 29 Maret 2009	Sekretariat Kabinet		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
191	NOMOR 38 TAHUN 2009 Tentang POS	Jakarta, 14 Oktober 2009	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
192	NOMOR 1 TAHUN 2009 Tentang PENERBANGAN	Jakarta, 12 Januari 2009	Kementerian Perhubungan		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
193	NOMOR 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN	Jakarta, 6 Oktober 2004	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
194	NOMOR 17 TAHUN 2008 Tentang PELAYARAN	Jakarta, 7 Mei 2008	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
195	NOMOR 7 TAHUN 1996 Tentang PANGAN	Jakarta, 4 November 1996	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
196	NOMOR 1 TAHUN 2004 Tentang PERBENDAHARAAN NEGARA	Jakarta, 14 Januari 2004	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
197	NOMOR 24 TAHUN 2000 Tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL	Jakarta, 23 Oktober 2000	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
198	NOMOR 13 TAHUN 2010 Tentang HORTIKULTURA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
199	NOMOR 12 TAHUN 2010 Tentang GERAKAN PRAMUKA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
200	NOMOR 11 TAHUN 2010 Tentang CAGAR BUDAYA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
201	NOMOR 10 TAHUN 2010 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	Jakarta, 19 November 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
202	NOMOR 9 TAHUN 2010 Tentang KEPROTOKOLAN	Jakarta, 19 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
203	NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Jakarta, 22 Oktober 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
204	NOMOR 7 TAHUN 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009	Jakarta, 28 September 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

205	NOMOR 6 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI- PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI- PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)	Jakarta, 27 Agustus 2010	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
206	NOMOR 5 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	Jakarta, 20 Agustus 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
207	NOMOR 4 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)	Jakarta, 22 Juni 2010	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
208	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	Jakarta, 25 Mei 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
209	NOMOR 2 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	Jakarta, 25 Mei 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

210	NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008	Jakarta, 1 April 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
211	NOMOR 14 TAHUN 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK	Jakarta, 12 April 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
212	NOMOR 2 TAHUN 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 8 Juni 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
213	NOMOR 15 TAHUN 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Jakarta, 17 April 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
214	NOMOR 22 TAHUN 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI	Jakarta, 23 November 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
215	NOMOR 20 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Jakarta, 21 November 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
216	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001	Jakarta, 6 Agustus 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
217	NOMOR 16 TAHUN 2001 Tentang YAYASAN	Jakarta, 6 Agustus 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
218	Peraturan Pemerintah						
219	NOMOR 4 TAHUN 2016 Tentang PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	Jakarta, 14 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
220	NOMOR 61 TAHUN 2009 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 22 Oktober 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
221	NOMOR 38 TAHUN 2008 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 19 Mei 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
222	NOMOR 6 TAHUN 2006 Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 14 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

223	NOMOR 1 TAHUN 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 4 Juni 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
224	NOMOR 22 TAHUN 2005 Tentang PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 10 Juni 2005	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
225	NOMOR 21 TAHUN 2005 Tentang KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 19 Mei 2005	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
226	NOMOR 7 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 11 Februari 2004	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
227	NOMOR 68 TAHUN 2002 Tentang KETAHANAN PANGAN	Jakarta, 30 Desember 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
228	NOMOR 49 TAHUN 2002 Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 17 September 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
229	NOMOR 70 TAHUN 2001 Tentang KEBANDARUDARAAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
230	NOMOR 69 TAHUN 2001 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
231	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN	Jakarta, 19 September 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
232	NOMOR 73 TAHUN 1999 Tentang TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU	Jakarta, 10 Agustus 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
233	NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR	Jakarta, 27 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
234	No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan	Jakarta, 19 September 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
235	NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN	Jakarta, 5 Oktober 2004	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

236	NOMOR 53 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 6 Agustus 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
237	NOMOR 39 TAHUN 2010 Tentang KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 15 Juni 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
238	NOMOR 29 TAHUN 2010 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011	Jakarta, 14 Mei 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
239	NOMOR 24 TAHUN 2010 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 14 April 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
240	NOMOR 10 TAHUN 2008 Tentang PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
241	NOMOR 8 TAHUN 2006 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 20 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
242	PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
243	NOMOR 54 TAHUN 2010 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
244	Keputusan Presiden						
245	NOMOR 109 TAHUN 2001 Tentang UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN	Jakarta, 10 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
246	NOMOR 102 TAHUN 2001 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 13 September 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

247	NOMOR 82 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001	Jakarta, 25 Juni 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
248	NOMOR 58 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001	Jakarta, 16 Mei 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
249	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN	Jakarta, 22 Maret 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
250	NOMOR 37 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000	Jakarta, 22 Maret 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
251	NOMOR 177 TAHUN 2000 Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN	Jakarta, 15 Desember 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
252	NOMOR 165 TAHUN 2000 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 23 November 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
253	NOMOR 18 TAHUN 2000 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
254	NOMOR 17 TAHUN 2000 Tentang PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

255	NOMOR 6 TAHUN 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997	Jakarta, 11 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
256	PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
257	LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TANGGAL 3 NOPEMBER 2003	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
258	LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 TAHUN 2003 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
259	NOMOR 80 TAHUN 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
	Peraturan Menteri Pertanian						
260	NOMOR 70/PERMENTAN/KR.100/12/2015 Tentang INSTALASI KARANTINA HEWAN	Jakarta, 28 Desember 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
261	Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina Tindakan Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
262	Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
263	Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 25 November 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

264	Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 25 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
265	Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tentang PENDAFTARAN PESTISIDA	Jakarta, 10 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
266	Lampiran Permentan Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Terhadap Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
267	Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
268	Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan	Jakarta, 11 Agustus 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
269	Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi	Jakarta, 12 Mei 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
270	Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 25 Maret 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
271	Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 10 Februari 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

272	Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 2 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
273	Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN	Jakarta, 18 Maret 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
274	NOMOR 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
275	LAMPIRAN NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
276	NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
277	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/Permentan/PP.340/12/2011 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
278	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
279	Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 29 Desember 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

280	Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 Maret 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
281	Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
282	NOMOR 03/Permentan/OT.140/1/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 31 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
283	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	Jakarta, 3 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
284	NOMOR 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 31 Mei 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
285	NOMOR 51/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 17 Oktober 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
286	NOMOR 62/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK	Jakarta, 7 Juli 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
287	NOMOR 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN	Jakarta, 26 Juli 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
288	LAMPIRAN III NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang FORMULIR PERMOHONAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
289	LAMPIRAN II NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH DAN BIBIT TERNAK YANG AKAN DIKELUARKAN	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

290	LAMPIRAN I NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PEMASUKAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
291	NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
292	LAMPIRAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/5/2009	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
293	NOMOR 26/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
294	NOMOR 43/Permentan/OT.140/9/2006 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 12 September 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
295	NOMOR 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA JEPANG DAN KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 16 Februari 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
296	NOMOR 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 3 April 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
297	NOMOR 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF	Jakarta, 31 Maret 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
298	NOMOR 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)	Jakarta, 8 Maret 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
299	NOMOR 21/Permentan/OT.140/2.2010 Tentang PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 9 Februari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

300	NOMOR 20/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL PERTANIAN	Jakarta, 9 Februari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
301	NOMOR 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)	Jakarta, 22 Januari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
302	NOMOR 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI	Jakarta, 8 April 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
303	NOMOR 37/Permentan/OT.140/7/2009 Tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA PENGAPALAN	Jakarta, 30 Juli 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
304	NOMOR 38/Permentan/PP.340/8/2009 Tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 18 Agustus 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
305	NOMOR 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 9 Februari 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
306	NOMOR 09/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 6 Februari 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
307	NOMOR 36/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT	Jakarta, 1 Agustus 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

308	NOMOR 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang LAMPIRAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
309	NOMOR 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
310	NOMOR 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
311	NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 Tentang DOKUMEN KARANTINA HEWAN	Jakarta, 29 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
312	NOMOR 20/PERMENTAN/KR.0.40/6/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 6 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
313	NOMOR 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017 Tentang TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT	Jakarta, 23 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
314	NOMOR 05/PERMENTAN/KR.020/3/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 13 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

315	NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
316	NOMOR 01/PERMENTAN/KR.020/1/2017 Tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Jakarta, 17 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
317	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 15 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
318	NOMOR 31/PERMENTAN/KR.010/7/2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 93/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 20 Juli 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
319	NOMOR 35/PERMENTAN/KR.020/8/2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENYAKIT TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 3 Agustus 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
320	NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN	Jakarta, 2 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
321	NOMOR 20 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 4 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
322	NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN	Jakarta, 26 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

Keputusan Menteri Pertanian							
229	NOMOR 1596/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BRASIL	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
230	NOMOR 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
231	NOMOR 1597/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN WILAYAH KEPABEANAN TAIWAN, PENGHU, KINMEN DAN MATSU (THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU)	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
232	Nomor 1178/Kpts/KR.040/L/8/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia	Jakarta, 16 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
233	Nomor 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir	Jakarta, 1 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
234	Nomor 563/Kpts/KR.050/8/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat	Jakarta, 16 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
235	Nomor 976/KPTS/KR.040/2/7/2016 Tentang Registrasi Laborium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan	Jakarta, 1 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
236	Nomor 968/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang	Jakarta, 29 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
237	Nomor 967/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili	Jakarta, 29 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
238	NOMOR 881/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CINA	Jakarta, 16 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

239	NOMOR 833/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA UNI EMIRAT ARAB	Jakarta, 6 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
240	NOMOR 725/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SPANYOL	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
241	NOMOR 721/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MALAYSIA	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
242	NOMOR 727/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
243	NOMOR 235/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM KEMAMAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
244	NOMOR 237/Kpts/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
245	NOMOR 236/KPTS/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
246	NOMOR 234/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AFRIKA SELATAN	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
247	NOMOR 474/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MYANMAR	Jakarta, 31 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
248	NOMOR 439/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TURKI	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
249	NOMOR 438/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

250	NOMOR 437/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
251	NOMOR 100/KPTS/KR.040/L/1/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KOREA SELATAN	Jakarta, 22 Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
252	NOMOR 103/KPTS/KR.040/L/1/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND	Jakarta, 22 Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
253	NOMOR 229/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CHINA	Jakarta, 16 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
254	NOMOR 227/KPTS/KR.130/L/02/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM	Jakarta, 15 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
255	NOMOR 282/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TUNISIA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
256	NOMOR 280/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ECUADOR	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
257	NOMOR 281/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELGIA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
258	NOMOR 277/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
259	NOMOR 279/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
260	Nomor 1323/Kpts/PP.340/12/2014 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru	Jakarta, 29 Desember 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

261	Nomor 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kanada	Jakarta, 15 Juli 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
262	NOMOR 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KANADA	Jakarta, 15 Juli 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
263	NOMOR 605/Kpts/OT.160/10/2006 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMASUKAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN DAN PRODUK IKUTANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	17 Oktober 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
264	NOMOR 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tentang PENETAPAN PULAU FLORES DAN PULAU LEMBATA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) SERTA PROGRAM PEMBEBASANNYA	Jakarta, 1 Agustus 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
265	NOMOR 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tentang PERNYATAAN PROPINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANTHRAX	Jakarta, 15 Juli 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
266	NOMOR 892/Kpts/TN.560/9/1997 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 5 September 1997	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
267	NOMOR 444/Kpts/TN.540/7/2002 Tentang PERNYATAAN PULAU LOMBOK PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT BRUCELLOSIS	Jakarta, 15 Juli 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
268	NOMOR 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008 Tentang PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI	Jakarta, 1 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
269	NOMOR 1969/Kpts/PD.610/12/2008 Tentang PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 12 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
270	NOMOR 1096/Kpts/TN.120/10/1999 Tentang PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA	Jakarta, 13 Oktober 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

271	NOMOR 566/Kpts/PD.640/10/2009 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BANTEN DAN JAWA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 6 Oktober 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
272	LAMPIRAN II NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
273	LAMPIRAN I NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
274	NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
275	LAMPIRAN II NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang SEGEL	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
276	LAMPIRAN I NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang NOTIFICATION OF NON COMPLIANCE DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
277	NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
278	NOMOR 1596/KR.040/K/08/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MESIR	Jakarta, 31 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
279	NOMOR 1221/Kpts/KR.040/07/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA	Jakarta, 18 Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

280	NOMOR 1222/KPTS/KR.040/07/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1596/KPYS/KR.040/K/11/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BRASIL	Jakarta, 18 Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
281	NOMOR 646/KPTS/KR.040/K/05/2017 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 5 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
282	NOMOR 647/KPTS/KR.040/K/05/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 278/KPTS/KR.130/L/2/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA INDIA	Jakarta, 5 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
283	NOMOR 614/KPTS/KR.040/K/4/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MESIR	Jakarta, 28 April 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
284	NOMOR 37/KPTS/PK.210/1/2017 Tentang PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA BELANDA, JERMAN, DAN PERANCIS KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 20 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
285	NOMOR 38/KPTS/PK.210/1/2017 Tentang PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRIA, DENMARK, FINLANDIA, HUNGARIA, KROASIA, POLANDIA, ROMANIA, RUSIA, SWEDIA, SWISS DAN UKRAINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 20 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
286	NOMOR 1820/KPTS/KR.040/K/12/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SRI LANGKA	Jakarta, 27 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
287	NOMOR 1821/KPTS/KR.040/K/12/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ITALIA	Jakarta, 27 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

288	NOMOR 778/KPTS/PP.340/11/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PERANCIS	Jakarta, 16 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
289	NOMOR 360/KPTS/KP.010/6/2017 Tentang PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 5 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
290	Nomor 1866/Kpts/KR.130/K/10/2017 PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 279/KPTS/KR.130/L/2/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 23 Oktober 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
291	Nomor 34/KPTS/KR.050/1/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KANADA	Jakarta, 5 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
292	Nomor 35/Kpts/KR.050/1/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AMERIKA SERIKAT	Jakarta, 5 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
293	Nomor 101/KPTS/KR.040/K/1/2018 PERUBAHAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NO.881/KPTS/KR.040/L/6/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 18 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
294	Nomor 308/KPTS/KR.050/4/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 27 April 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
295	Nomor 322/KPTS/KR.050/5/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 7 Mei 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
296	Nomor 2315/KPTS/KR.040/K/10/2018 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PHILIPINA	Jakarta, 24 Oktober 20118	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
297	Nomor 775/KPTS/KR.040/11/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CILE	Jakarta, 6 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

298	Nomor 33/Kpts/KR.040/K/01/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PERU	Jakarta, 7 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
299	Nomor 32/KPTS/KR.040/K/01/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA APRIKA SELATAN	Jakarta, 7 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
300	Nomor 38/KPTS/KR.040/K/1/2019 REGISTRASI LABORATORIUM, PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA UKRAINA	Jakarta, 7 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
301	Nomor 362/KPTS/KR.040/K/1/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KOREA SELATAN	Jakarta, 24 Januari 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
302	Nomor 183/KPTS/PP.340/M/3/2019 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PERANCIS	Jakarta, 4 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
303	Nomor 1122/Kpts/KR.040/K/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TURKI	Jakarta, 23 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
304	Nomor 964/KPTS/KR.040/K/03/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND	Jakarta, 25 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
305	Nomor 963/KPTS/KR.040/K/03/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM	Jakarta, 25 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
306	Nomor 961/Kpts/KR.040/k/03/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA	Jakarta, 25 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
307	Nomor 962/kPTS/kr.040/k/03/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA INDIA	Jakarta, 25 Maret 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
308	Nomor 1087/Kpts/KR.040/K/04/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA RUMANIA	Jakarta, 22 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

309	Nomor 1151/Kpts/KR.040/K/04/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SPANYOL	Jakarta, 29 April 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
310	Nomor 1246/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MYANMAR	Jakarta, 13 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
311	Nomor 1281KPTS/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA	Jakarta, 20 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
312	Nomor 1327/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELGIA	Jakarta, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
313	Nomor 1330/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BULGARIA	Jakarta, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
314	Nomor 1326/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MESIR	Jakarta, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
315	Nomor 1329/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PHILIPINA	Jakarta, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
316	Nomor 1328/Kpts/KR.040/K/05/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI	Jakarta, 31 Mei 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
317	Nomor 1427/Kpts/KR.040/K/06/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MALAYSIA	Jakarta, 19 Juni 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
318	Nomor 1592/Kpts/KR.040/K/07/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGARA ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 1 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
319	Nomor 1591/Kpts/KR.040/K/07/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK	Jakarta, 1 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

320	Nomor 1632/Kpts/KR.040/K/07/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PAKISTAN	Jakarta, 5 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
321	Nomor 1642/Kpts/KR.040/K/07/2019 REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CHILE	Jakarta, 8 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
SK Dirjen/Kabandan							
322	Nomor 1436/Kpts/KU.030/L/10/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina	Jakarta, 7 Oktober 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
323	Nomor 1209/Kpts/KR. 110/L/8/2016 Tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina	Jakarta, 23 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
324	NOMOR 406/KPTS/KR.150/L/3/2016 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 17 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
325	Lampiran Form SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
326	Lampiran II SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
327	Lampiran I SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
328	Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015 Tentang Pedoman Penetapan Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Berupa Pemeriksaan Fisik Terhadap Media Pembawa Barecore	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
329	NOMOR 442/Kpts/KP.340/L/4/2015 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DENGAN BAHAN AKTIF ALFA SIPERMETRIN TERHADAP WOODCHIPS	Jakarta, 13 April 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
330	Nomor 1158/Kpts/OT.160/L/12/2014 Tentang Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
331	NOMOR 156/Kpts/KR.120/L/2/2015 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENIH HEWAN	Jakarta, 10 Februari 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

332	Lampiran NOMOR 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN UNTUK KONSUMSI (KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN)	Jakarta, 19 Oktober 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
333	NOMOR 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN UNTUK KONSUMSI (KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN)	Jakarta, 19 Oktober 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
334	NOMOR 185/Kpts/OT.160/L/2/2014 Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG OPERASIONAL KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 19 Februari 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
335	Lampiran SK Kabadan No. 3611/kpts/HK.020/L/12/2013	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
336	Lampiran SK Nomor 3615/Kpts/HK.060/L/12/2013 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
337	Nomor 3615/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
338	Lampiran SK Nomor 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Adimistrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
339	Nomor 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
340	Nomor 3611/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
341	NOMOR 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 Tentang KATEGORISASI TINGKAT RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA SERTA KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 29 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

342	LAMPIRAN II PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
343	LAMPIRAN I PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
344	NOMOR 2053/Kpts/OT.160/L/10/2011 Tentang PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
345	LAMPIRAN NOMOR 1606/kpts/OT.160/L/6/2011 Tentang PEDOMAN SOSIALISASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Juni 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
346	NOMOR 1606/kpts/OT.160/L/6/2011 Tentang PEDOMAN SOSIALISASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Juni 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
347	NOMOR 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang LAMPIRAN STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI FOSFIN FORMULASI CAIR (LIQUID PHOSPHINE)	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
348	NOMOR 1646/ Kpts/HM.110/L/05/2013 Tentang LAMPIRAN PEDOMAN MANAJEMEN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
349	NOMOR 1646/Kpts/HM.110/L/05/2013 Tentang PEDOMAN MANAJEMEN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
350	NOMOR 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI FOSFIN FORMULASI CAIR (LIQUID PHOSPHINE)	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
351	Lampiran NOMOR 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI ETHYL FORMATE	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
352	NOMOR 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI ETHYL FORMATE	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

353	Lampiran NOMOR 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 Tentang PEDOMAN KEGIATAN PRE-EMPTIF DALAM MEMBINA KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 3 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
354	NOMOR 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 Tentang PEDOMAN KEGIATAN PRE-EMPTIF DALAM MEMBINA KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 3 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
355	NOMOR 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang PEDOMAN UMUM TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)	Jakarta, 1 Mei 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
356	Lampiran KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN Nomor 222/Kpts/KT.050/L/02/2012 Tentang PEDOMAN TACARA PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 14 Februari 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
357	NOMOR 222/Kpts/KT.050/L/02/2012 Tentang PEDOMAN TACARA PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 14 Februari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
358	NOMOR 2051 Tahun 2011 Tentang JUKLAK dan JUKNIS PENYIDIKAN	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
359	NOMOR 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA HPAI	Jakarta, 20 November 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
360	NOMOR 355.a/Kpts/PD.670.320/L/9/2008 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HPHK PADA SUSU DAN HASIL OLAHANNYA	Jakarta, 8 September 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
361	NOMOR 436.a/Kpts/PD.670.320/L/11/07 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP SUSU DAN PRODUK OLAHANNYA	Jakarta, 16 November 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

362	NOMOR 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN	Jakarta, 25 Juni 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
363	NOMOR 2898.a/PD.670.320/L/10/07 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK	Jakarta, 4 Oktober 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
364	NOMOR 501/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK SATWA PRIMATA	Jakarta, 4 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
365	LAMPIRAN NOMOR 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALULINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA)	Jakarta, 13 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
366	LAMPIRAN NOMOR 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 15 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
367	NOMOR 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 15 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
368	NOMOR 344.b/Kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALU LINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA)	Jakarta, 13 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
369	NOMOR 384.A/Kpts/PD.670.030/L/10/2007 Tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN	Jakarta, 4 Oktober 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
370	NOMOR 499.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK PRODUK HEWAN PANGAN (DAGING, KARKAS DAN JEROAN)	Jakarta, 3 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

371	NOMOR 499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK DAY OLD CHICK (DOC)	Jakarta, 3 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
372	NOMOR 322/KPTS/OT.160/K/02/2017 Tentang PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 28 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
373	NOMOR 322./KPTS/OT.160/K/02/2017 Tentang LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR 322/KPTS/OT.160/K/02/2017 PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 28 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
374	NOMOR 1960/KPTS/KR.120/K/11/2017 Tentang PEDOMAN APLIKASI PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN SECARA ONLINE	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
375	NOMOR 2167/KPTS/KP.250/K/12/2017 Tentang ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
376	NOMOR 1949/KPTS/KR.120/K/11/2017 Tentang PEDOMAN PENILAIAN LAYANAN PRIORITAS KARANTINA HEWAN	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
377	NOMOR 1602/KPTS/KP.330/K/9/2017 Tentang MUTASI ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 4 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
378	NOMOR 1740/KPTS/KP.430/K/09/2017 Tentang PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2017	Jakarta, 26 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
379	NOMOR 177/KPTS/OT.160/K/01/2017 Tentang RANCANG INDUK PENGEMBANGAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 30 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

380	NOMOR 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 29 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
381	NOMOR 416/KPTS/OT.160/L/4/2014 Tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	Jakarta, 15 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
382	NOMOR 406/KPTS/OT.160/L/4/2016 Tentang PEDOMAN PEMANASAN SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	Jakarta, 11 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
383	NOMOR 832/KPTS/OT.140/L/3/2013 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE REPUBLIK RAKYAT CHINA	Jakarta, 27 Maret 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
384	NOMOR 374/KPTS/KH.210/L/5/2010 Tentang TEKNIS PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI	Jakarta, Mei 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
385	NOMOR 395/KPTS/OT.160/L/4/2014 Tentang PEDOMAN PEMANTAU KARANTINA TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	Jakarta, 7 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

386	NOMOR 905/KPTS/HK.110/L/6/2016 Tentang KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN KHUSUS, DAN INTELIJEN BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 17 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
387	NOMOR 1785/KPTS/OT.210/K/12/2016 Tentang PEDOMAN KERJA KEPOLISIAN KHUSUS BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 16 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
388	Nomor 1962/KPTS/KR.120/K/11/2017 PEDOMAN DESKRIPSI DAN KATEGORISASI RISIKO BAHAN BIOLOGI	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
389	Nomor 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
390	Nomor 2205/KPTS/KR.120/K/12/2017 PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PRODUK HEWAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 28 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
391	Nomor 2471/KPTS/KR.020/K/11/2018 PERCEPATAN LAYANAN SERTIFIKASI EKSPOR KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 13 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
392	Nomor 2523/KPTS/KR.020/K/11/2018 PENILAIAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMERIKSAAN SECARA IN-LINE INSPECTION DALAM TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 November 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
393	Nomor 2734/KPTS/KR.020/K/12/2018 PEDOMAN TINDAKAN PERLAKUAN DAN PENGAWASAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA LAIN YANG DITURUNKAN DARI PESAWAT UDARA	Jakarta, 19 Desember 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
394	Nomor 1593/KPTS/KR.020/K/7/2019 PEDOMAN PEMANTAUAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 1 Juli 2019	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS



 REPUBLIK INDONESIA
 Kementerian Pertanian
 Badan Karantina Pertanian
 Japar Sidik, SP, MH
 NIP. 19610728 198503 1 001